

# LKJIP DINAS PERKEBUNAN (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



# 2022

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran MENPAN Nomor 15 tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen penetapan kinerja.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat, perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi dan diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat LKjIP masih melaporkan kondisi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dalam pelaksanaan urusan di bidang pertanian khususnya perkebunan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Dari dua sasaran strategis Dinas Perkebunan pencapaian kinerja dan akuntabilitas Dinas Perkebunan menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari pencapaian kinerja sasaran dengan predikat sangat tinggi dengan nilai  $\geq 100\%$ .

Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan terima kasih.

Sukamenanti, 06 Februari 2022



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Bupati Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Visi Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

### **“Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun anggaran 2022, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 15 kegiatan dalam 6 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya, guna pencapaian 2 sasaran strategis pembangunan perkebunan dalam 2 indikator kinerja utama dan 1 (satu) tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama. Rincian atas capaian indikator sasaran kinerja Dinas Perkebunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
I. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	% Peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan		2,25	5,29	235 %	Sangat Tinggi
	1. Kelapa Sawit	%	2,24700	5,29	235 %	Sangat Tinggi
	2. Kopi Arabika	%	0,00001	0,00006	600 %	Sangat Tinggi

	3. Kopi Robusta	%	0,00061	0,00087	143 %	Sangat Tinggi
	4. Nilam	%	0,00066	0,00196	297 %	Sangat Tinggi
	5. Kelapa Dalam	%	0,00140	0,00215	154 %	Sangat Tinggi
	6. Kelapa Hibrida	%	-	-	100 %	Sangat Tinggi
	7. Pinang	%	0,00032	0,00035	109 %	Sangat Tinggi
II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja					
	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100 %	Sangat Tinggi
	2. Nilai SAKIP	Level	B			
	3. Level Maturitas SPIP	Nilai	2.35	3.13	133 %	Sangat Tinggi

Seluruh target indikator kinerja sasaran dapat mencapai target 100 % pada tahun 2022 namun ada indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai dengan Renstra. Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan yang saling berkaitan, yaitu :

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan di tahun 2022 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Terjadi kesalahan dalam penganggaran dimana nilai SSH (Satuan Stansar Harga) tidak lagi sesuai karena harga pasar yang mengikuti kenaikan harga BBM sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.
4. Masalah-masalah teknis, misalnya tidak terlaksananya dengan baik hamper seluruh kegiatan disebabkan tidak adanya dana tugas pembantuan APBN tahun 2022, kurangnya tenaga teknis di lapangan, realisasi penyaluran pupuk tidak sesuai dengan rekomendasi karena ketersediaan pupuk yang tidak memadai dengan permintaan/kebutuhan sebenarnya di lapangan dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM OPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana OPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, antara barang/jasa yang tersedia secara fisik di toko dengan belanja yang ada di DPA.

Uraian capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan /permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Segala keberhasilan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Struktur Organisasi	1
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.4. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan	3
1.5. Visi, Misi Dan Program Pembangunan Daerah	7
1.6. Sumber Daya Alam dan Keunggulan	10
1.7. Sumber Daya Manusia	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	19
3.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	23
3.2. Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	26
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Strategi Pemecahan Masalah	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### **1. 2. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - 1. Sub Bagian Umum dan Aset;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kepegawaian; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan;
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penyusunan Program;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Statistik/ Pendataan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Produksi;
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemberian;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Budidaya; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perlindungan Tanaman.
- e. Bidang Sarana dan Pengolahan;
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembiayaan dan Pengelolaan Lahan;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengolahan dan Mutu Hasil; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemasaran.

- f. Bidang Penyuluhan;
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kelembagaan;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Ketenagaan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Metode dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 susunan organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

- Kepala Dinas : Ir. Edrizal
- Sekretaris Dinas : Roni Hendri Eka Putra, S.Hut
- Kepala Bidang Sarana dan Pengolahan : Tabrani, S.Ag
- Kepala Bidang Produksi : Harri Persada, SP, M.Si
- Kepala Bidang Perencanaan : Afrizal, SP, M.Si
- Kepala Bidang Penyuluhan : Sahmirdan, SP

### **1. 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. Kedudukan**

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas Pokok**

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu kelapa daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

### c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan meliputi peningkatan produksi perkebunan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
4. Melaksanakan evaluasi di bidang perkebunan;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **1. 4. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan**

Pembangunan Perkebunan secara umum memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestic regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.

Permasalahan pembangunan perkebunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan perkebunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan yang dihadapi pembangunan perkebunan semakin kompleks karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sedangkan lahan yang tersedia tidak bertambah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas petani, terutama petani kebun/petani tradisional
- SDM perkebunan merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan perkebunan itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/

kelompok tani dalam berusaha tani. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas perkebunan yang berkualitas. Permasalahan utama ketenaga kerjaan di sektor perkebunan, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani.

## 2. Keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk memberikan kemudahan kepada petani sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan untuk mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme penganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah pupuk perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDKK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

## 3. Keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi

Prasarana perkebunan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas perkebunan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan jalan produksi yang dibutuhkan petani secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas perkebunan.

4. Belum optimalnya fungsi penyuluhan pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani, maupun Gapoktan

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani dalam pembangunan perkebunan adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, yaitu aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar modal serta adopsi inovasi-inovasi pertanian. Keberadaan kelembagaan tani sebagai wadah aspirasi petani, tempat transfer ilmu dan teknologi untuk menunjukkan bahwa kelembagaan tani sangat esensi bagi petani, kelembagaan yang efektif akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Untuk pemberdayaan kelembagaan tani sangat dibutuhkan penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak dalam transfer ilmu kepada petani.

5. Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah, karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani

Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perkebunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani.

6. Ketidakstabilan harga komoditi perkebunan

Harga komoditi perkebunan dipengaruhi oleh perdagangan internasional karena sebagian besar merupakan produk ekspor import. Sebagai produk yang diperjualbelikan di pasar ekspor import harus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Kurangnya pengetahuan petani tentang standar mutu

menjadi penyebab rendahnya daya tawar petani. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan harga yang diterima petani rendah karena adanya margin keuntungan untuk pedagang pengumpul dan pedagang besar sebelum sampai di Pabrik. Untuk stabilisasi harga komoditi perkebunan perlu meningkatkan kemitraan antara kelompok tani, KUD dengan perusahaan/pabrik perkebunan.

**Tabel 1.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kapasitas petani terutama petani kebun/petani tradisional	Rendahnya SDM petani terutama petani kebun/petani tradisional	Rendahnya tingkat pendidikan petani
			Keterbatasan terhadap akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
2	Terbatasnya prasarana dan sarana produksi pertanian	Kurangnya Fasilitasi penyediaan prasarana sarana pertanian	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian
3	Keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi	Masih terbatasnya jalan produksi perkebunan	Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan jalan produksi yang dibutuhkan
4	Belum Optimalnya fungsi penyuluhan pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani maupun Gapoktan	Belum optimal dalam pemberdayaan kelompok tani/kelembagaan tani lainnya	Kurangnya tenaga penyuluhan perkebunan di lapangan
			Rendahnya partisipasi aktif petani didalam kelompok tani
			Kontribusi kelompok tani/kelembagaan tani lainnya masih rendah
5	Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah	Rendahnya kemauan petani untuk bergabung ke kelembagaan tani	karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani
6	Ketidakstabilan harga komoditi perkebunan	Rendahnya harga di tingkat petani	Panjangnya rantai pemasaran

## **1.5. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah**

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangka menengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 6 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistik yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026 adalah :

" Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan  
Sejahtera"

Berdasarkan visi jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026, Adapun misi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dikelompokkan secara garis besar dalam 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Misi untuk Dinas Perkebunan Misi ke 3 yang dimaknai nilai fundamental dari beberapa poin misi, sebagai berikut :

- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan
- 5) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat
- 6) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat.

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

**Tabel 1.2. Penjabaran Kata Kunci Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

<b>Kata Kunci Visi</b>	<b>Poin Misi</b>	<b>Misi</b>
Masyarakat yang Maju dan Sejahtera	<p>4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan</p> <p>5) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat</p> <p>6) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah</p>	3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

**Tabel 1.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat</b>			
1	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	<u>Tujuan 1</u> Penerapan tata kelola pemerintahan profesional,	<u>Sasaran 1.1.</u> Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

		akuntabel dan inovatif	
<b>Pasaman Barat Maju dan Sejahtera</b>			
3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	<u>Tujuan 4:</u> Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	<u>Sasaran 4.3:</u> Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal

Terkait dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tugas dan fungsi OPD Dinas Perkebunan terdapat pada misi ketiga yakni Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan Tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan.

**Tabel 1.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif</b>		
Tujuan 4 : Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Sasaran 4.3 Penguatan Industri berbasis komoditas unggulan lokal	<u>Strategi 4.3.2</u> Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian perkebunan. Dengan arah kebijakan pembangunan sbb : a) Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas b) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis komoditas unggulan dan lokasi prioritas c) Pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian d) Penguatan kelembagaan pertanian e) Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditas perkebunan. f) Membangun sarana dan prasarana perdagangan g) Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan.

## 1.6. Sumber Daya Alam dan Keunggulan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan berperan sebagai OPD yang bertugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pembangunan Perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Pasaman Barat baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar telah menghasilkan pengalaman yang sangat berharga dan telah memberikan suatu pemahaman bahwa usaha perkebunan sangat berkaitan langsung dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam aspek ekonomi, usaha perkebunan telah memberi peranan yang penting antara lain dalam penerimaan devisa negara, sumber ekonomi daerah (PAD) serta sumber pendapatan masyarakat. Untuk pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan sektor perkebunan, Dinas Perkebunan telah melaksanakan pelayanan secara maksimal. Luas areal dan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 1.5. Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	7	8
1.	<b>Kelapa Sawit</b>						
	a. Luas	166.547	184.871	185.324	189.947	189.508	Hektar
	b. Produksi (TBS)	2.881.261,83	2.710.239,93	2.817.844,56	2.883.558,03	2.873.113,89	Ton
2.	<b>Kakao</b>						
	a. Luas	10.308	10.215	9.696	7.450	6.949	Hektar
	b. Produksi	9.306,61	9.110,76	9.199,41	5.499,98	4.120,76	Ton
3.	<b>Karet</b>						
	a. Luas	8.631	7.845	7.840	7.840	7.827	Hektar
	b. Produksi	7.748,00	7.997,75	7.948,72	6.006,25	5.891,61	Ton
4.	<b>Kelapa Dalam</b>						
	a. Luas	2.799	1.503	1.503	1.503	1.565	Hektar
	b. Produksi	2.015,62	1.741,46	1.763,17	1.797,72	1.800,21	Ton
5.	<b>Nilam</b>						
	a. Luas	2.386	2.397	2.385	2.477	2.495	Hektar
	b. Produksi	211,56	214,18	232,61	249,93	267,84	Ton

<b>6.</b>	<b>Kopi Robusta</b>						
	a. Luas	822	840	840	840	843	Hektar
	b.Produksi	406,40	408,40	424,50	429,85	432,23	Ton
<b>7.</b>	<b>Kopi Arabika</b>						
	a. Luas	262	295	290	310	303	Hektar
	b.Produksi	49,80	54,70	54,80	55,83	56,46	Ton
<b>8.</b>	<b>Pinang</b>						
	a. Luas	579	580	598	696	719	Hektar
	b.Produksi	390,59	369,69	372,72	378,67	379,26	Ton
<b>9.</b>	<b>Aren</b>						
	a. Luas	238	272	272	272	272	Hektar
	b.Produksi	239,02	239,89	247,19	247,26	249,20	Ton
<b>10.</b>	<b>Kayu Manis</b>						
	a. Luas	66	67	67	67	68	Hektar
	b.Produksi	113,52	84,50	83,20	57,30	44,40	Ton
<b>11.</b>	<b>Garda Munggu</b>						
	a. Luas	113	115	132	145	145	Hektar
	b.Produksi	27,60	27,78	30,54	30,57	33,36	Ton
<b>12.</b>	<b>Lada/Merica</b>						
	a. Luas	67	65	65	45	45	Hektar
	b.Produksi	26,86	26,95	27,61	11,19	9,87	Ton
<b>13.</b>	<b>Cengkeh</b>						
	a. Luas	16	19	19	19	19	Hektar
	b.Produksi	2,48	2,50	2,55	2,25	2,16	Ton
<b>14.</b>	<b>Pala</b>						
	a. Luas	354	288	288	288	288	Hektar
	b.Produksi	7,50	7,52	8,08	7,25	7,26	Ton
<b>15.</b>	<b>Sereh Wangi</b>						
	a. Luas	0	293	293	293	186	Hektar
	b.Produksi	0	22,50	26,39	39,10	13,10	Ton

Dilihat dari tabel di atas, potensi yang sangat besar terdapat pada beberapa komoditi unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan petani secara nyata dan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Nilam, Kelapa Dalam, Kopi dan Pinang.

### 1.7. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perkebunan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 89 orang dengan rincian golongan sebagai berikut:

**Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jumlah Pegawai (PNS/PTT/THL/THL-TB) berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2017 Jumlah (orang)	Tahun 2018 Jumlah (orang)	Tahun 2019 Jumlah (orang)	Tahun 2020 Jumlah (orang)	Tahun 2021 Jumlah (orang)	Tahun 2022 Jumlah (orang)
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	1
3	SMU/SMK	22	25	24	25	13	20
4	D-I	-	1	-	-	-	-
5	D-III	9	14	12	11	6	10
6	S-1	42	50	52	58	47	55
7	S-2	4	4	4	3	3	3
8	S-3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		77	94	92	97	69	89

**Tabel 1.7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan**

Uraian Pegawai (PNS) berdasarkan pangkat/ Golongan	Tahun 2017 Jumlah (orang)	Tahun 2018 Jumlah (orang)	Tahun 2019 Jumlah (orang)	Tahun 2020 Jumlah (orang)	Tahun 2021 Jumlah (orang)	Tahun 2022 Jumlah (orang)
Golongan IV	5	6	6	6	3	6
Golongan III	26	24	27	27	26	24
Golongan II	6	4	1	1	1	2
Golongan I	-	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	-	-	4	4
PTT	8	8	8	8	8	8
THL	32	31	30	33	27	45
THL - TB	-	21	20	22	-	-
		77	94	92	97	69
						89

**Tabel 1.8. Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Uraian	Jumlah Yang harus diisi (orang)	Jumlah yang telah diisi (orang)	Ket
1	Eselon II	1	1	
2	Eselon III a	1	1	
3	Eselon III b	4	4	
4	Eselon IV/Fungsional Setara	17	14	
5	Jabatan Fungsional	28	12	

Untuk mendukung pelaksanaan urusan diperlukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai berikut :

**Tabel 1.9. Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

No	Uraian Sarana/Prasarana	Jumlah yang tersedia	Keterangan
1	Traktor	1	Rusak
2	Mesin Proses	1	Rusak
3	Genset	2	-
4	Kendaraan Roda Empat	3	-
5	Kendaraan Roda Dua	41	-
6	Mesin Bor	2	-
7	GPS	2	-
8	Traktor Tangan	1	Rusak
9	Alat Pengukur PH Tanah	1	-
10	Lemari Besi	10	-
11	Rak Besi / Metal	6	-
12	Rak Kayu	3	-
13	Filling Besi / Metal	21	-
14	Lemari Kaca	2	-
15	Lemari Makan	1	-
16	Lemari Kayu	9	1 Rusak
17	Papan Visual	1	Rusak
18	Papan Nama Instansi	1	-

<b>No</b>	<b>Uraian Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah yang tersedia</b>	<b>Keterangan</b>
19	Papan Pengumuman	7	-
20	Papan Tulis	2	-
21	White Board	1	-
22	Mesin Absensi	1	-
23	Papan Struktur Organisasi	1	-
24	Meja Rapat	2	-
25	Meja Resepsiionis	2	-
26	Meja Bundar	1	-
27	Kursi Rapat	40	1 Rusak
28	Kursi Tamu	7	-
29	Kursi Putar	8	4 Rusak
30	Kursi Biasa	21	-
31	Sofa	1	-
32	Mesin Penghisap Debu	1	-
33	Mesin Potong Rumput	2	-
34	Lemari Es	2	-
35	AC Window	1	-
36	AC Split	15	-
37	Kipas Angin	4	-
38	Kompor Gas	1	-
39	Televisi	3	-
40	Sound System	3	-
41	Tiang Bendera	1	-
42	Tangga Aluminium	1	-
43	Alat Pemadam Portable	2	-
44	LAN	1	-
45	P.C Unit	12	-
46	Laptop	22	3 Rusak
47	Note Book	1	Rusak
48	Hard Disk	5	1 Rusak
49	Printer	20	2 Rusak
50	Meja Kerja Eselon II	2	-
51	Meja Kerja Eselon III	10	-
52	Meja Kerja Eselon IV	21	1 Rusak

<b>No</b>	<b>Uraian Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah yang tersedia</b>	<b>Keterangan</b>
53	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	30	2 Rusak
54	Kursi Kerja Eselon II	4	-
55	Kursi Kerja Eselon III	3	-
56	Kursi Kerja Eselon IV	21	1 Rusak
57	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	17	3 Rusak
58	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9	-
59	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	-
60	Meja Kayu Bulat	1	-
61	Meja Kayu Petak	6	-
62	Kursi Kayu	14	-
63	Proyektor	1	-
64	UPS	8	-
65	Camera Elektronik	5	-
66	Faxmile	2	-
67	Tong Air dan Tower	1	-
68	Selang Air	2	-
69	Mesin Pompa Air	1	-
70	Mesin Scanner	2	-

Faktor-faktor penentu keberhasilan meliputi :

1. Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian sehingga organisasi dapat berjalan optimal;
2. Meningkatkan profesionalisme dan moral dari Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Pengawasan kegiatan;
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan seluruh jajaran pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang terkait;
4. Mensosialisasikan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM);
5. Melakukan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan bidang perkebunan;
6. Pemanfaatan dana pembangunan secara transparansi, sehingga dapat dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati Pasaman Barat melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perkebunan tahun 2021-2026, antara lain:

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	% Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan: 1. Kelapa Sawit 2. Kopi Arabika 3. Kopi Robusta 4. Nilam 5. Kelapa Dalam 6. Kelapa Hibrida 7. Pinang	2.23	2.25	2.65	3.00	3.25	3.5
			1. Opini BPK terhadap laporan keuangan 2. Nilai SAKIP 3. Level Maturitas SPIP	2.22700 0.00001 0.00061 0.00066 0.00140 0.00000 0.00032	2.24700 0.00001 0.00061 0.00066 0.00140 0.00000 0.00032	2.64600 0.00003 0.00065 0.00090 0.00174 0.00000 0.00068	2.99530 0.00005 0.00067 0.00140 0.00178 0.00000 0.00080	3.24400 0.00008 0.00070 0.00150 0.00192 0.00090 0.00090	2.49240 0.00010 0.00072 0.00160 0.00214 0.00190 0.00114

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan:		2,25
	Kelapa Sawit		2.24700
	Kopi Arabika		0.00001
	Kopi Robusta		0.00061
	Nilam		0.00066
	Kelapa Dalam		0.00140
	Kelapa Hibrida		0.00000
	Pinang		0.00032
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP	B
		Level Maturitas SPIP	2.35
		Opini terhadap laporan keuangan	WTP

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.744.219.114
2.	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	293.224.000
3.	Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.332.471.951
4.	Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12.432.500
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	15.790.000
6.	Program Penyuluh Pertanian	255.342.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.653.479.565</b>

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat maka dialokasikan anggaran belanja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.653.479.565,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 4.084.778.502,- dan belanja barang dan jasa Rp. 4.568.701.063,- sedangkan untuk Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.992.842.527,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 4.489.561.464,-, belanja barang dan jasa Rp. 5.498.831.063,- dan belanja modal Rp. 4.450.000,-.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun 2022 menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan kinerja yang disusun masih merupakan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada (*resources*) demi tercapainya tujuan organisasi.

Untuk menilai kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Interval predikat capaian kinerja Dinas Perkebunan dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Skala Penilaian Capaian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
I. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	% Peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan		2,25	5,29	235 %	Sangat Tinggi
	1. Kelapa Sawit	%	2,24700	5,29	235 %	Sangat Tinggi
	2. Kopi Arabika	%	0,00001	0,00006	600 %	Sangat Tinggi
	3. Kopi Robusta	%	0,00061	0,00087	143 %	Sangat Tinggi
	4. Nilam	%	0,00066	0,00196	297 %	Sangat Tinggi
	5. Kelapa Dalam	%	0,00140	0,00215	154 %	Sangat Tinggi
	6. Kelapa Hibrida	%	-	-	100 %	Sangat Tinggi
	7. Pinang	%	0,00032	0,00035	109 %	Sangat Tinggi
II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja					
	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100 %	Sangat Tinggi
	2. Nilai SAKIP	Level	B	B	100 %	Sangat Tinggi
	3. Level Maturitas SPIP	Nilai	2.35	3.13	133 %	Sangat Tinggi

### **3.1. Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan**

#### **3.1.1. Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2022**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang

akan datang (*performance improvement*). Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Predikat
Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	% Peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan		2,25	5,29	235 %	Sangat Tinggi
	1. Kelapa Sawit	%	2,24700	5,29	235 %	Sangat Tinggi
	2. Kopi Arabika	%	0,00001	0,00006	600 %	Sangat Tinggi
	3. Kopi Robusta	%	0,00061	0,00087	143 %	Sangat Tinggi
	4. Nilam	%	0,00066	0,00196	297 %	Sangat Tinggi
	5. Kelapa Dalam	%	0,00140	0,00215	154 %	Sangat Tinggi
	6. Kelapa Hibrida	%	-	-	100 %	Sangat Tinggi
	7. Pinang	%	0,00032	0,00035	109 %	Sangat Tinggi

Perhitungan indikator sasaran % peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan merupakan hasil perhitungan jumlah realisasi produksi komoditi perkebunan tahun berjalan (n) dikurangi produksi komoditi perkebunan pada rencana strategis/RPJMD dibagi dengan produksi komoditi perkebunan pada rencana strategis/RPJMD dikali seratus, sebagaimana rumus berikut :

$$\% \text{ PPKPx} = \frac{\sum \text{RPKPx}_n - \sum \text{PKPPA}_x}{\sum \text{PTPPA}} \times 100$$

Keterangan :

% PPKPx = Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan x dalam persen

$\sum \text{RPKPx}_n$  = Jumlah Realisasi Produksi Komoditi Perkebunan x tahun sekarang

$\sum \text{PKPPA}_x$  = Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Perhitungan Awal Renstra/RPJMD

x = Jenis Komoditi Perkebunan yang dihitung

**Tabel 3.4.**  
**Hasil Perhitungan Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

Komoditi Sasaran	Angka Produksi Perhitungan Awal Renstra/ RPJMD (Ton)	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		Produksi (Ton)	% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan	Produksi (Ton)	% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan
% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan	-		2,25		5,29
Jumlah Produksi	2.731.530	2.793.096,85	2,25	2.876.049,88	5,29
1. Kelapa Sawit	2.728.742	2.790.199,40	2,24700	2.873.113,89	5,29
2. Kopi Arabika	54,70	55,52	0,00001	56,46	0,00006
3. Kopi Robusta	408,40	429,22	0,00061	432,23	0,00087
4. Nilam	214,18	236,75	0,00066	267,84	0,00196
5. Kelapa Dalam	1.741,46	1.797,53	0,00140	1.800,21	0,00215
6. Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-
7. Pinang	369,69	378,43	0,00032	379,25	0,00035

Sumber data : data produksi Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Tahun 2022

Tabel 3.3. menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, % Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan telah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat sangat tinggi yang artinya terjadi peningkatan produksi komoditi perkebunan untuk semua atau 7 (tujuh) komoditi sasaran yaitu Kelapa sawit, Kopi arabika, Kopi robusta, Nilam, Kelapa dalam, Kelapa hibrida dan Pinang melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dengan nilai capaian diatas 100 %.

Capaian indikator sasaran kinerja untuk tahun 2022 tertinggi terdapat pada komoditi kopi arabika, Nilam dan Kelapa sawit. Tiga komoditi ini merupakan komoditi unggulan perkebunan yang menjadi penopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan predikat indikator kinerja % peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan maka semua indikator sasaran pada tahun 2022 telah diupayakan dan terlaksana

dengan baik sehingga sasaran meningkatnya produksi komoditi perkebunan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

### **3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2022**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021- 2026, laporan tahun 2022 merupakan laporan tahun kedua untuk periode jangka menengah 2021-2026 maka tahun yang disandingkan dan digunakan adalah tahun 2021 dari Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021-2026. Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan**  
**Tahun 2021 dengan Tahun 2022.**

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022	2021	2022
I	% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan	5,67	5,29	254 %	235 %
	a. Kelapa Sawit	5,66800	5,29	254 %	235 %
	b. Kopi Arabika	0,00004	0,00006	400 %	600 %
	c. Kopi Robusta	0,00079	0,00087	130 %	143 %
	d. Nilam	0,00131	0,00196	198 %	297 %
	e. Kelapa Dalam	0,00206	0,00215	147 %	154 %
	f. Kelapa Hibrida	-	-	-	-
	g. Pinang	0,00033	0,00035	103 %	109 %

Pada tabel 3.5. dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja % peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 lebih tinggi dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2022, hal ini selain disebabkan oleh pagu anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 juga terdapat beberapa kendala dalam budidaya

komoditi perkebunan pada tahun 2022 seperti langka dan mahalnya harga pupuk, cuaca ekstrem basah yang mempengaruhi penurunan produktivitas tanaman serta harga jual hasil produksi perkebunan yang rendah.

**Tabel 3.6.**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunansampai tahun 2022 Dengan target Renstra Dinas Perkebunan 2021-2026**

<b>No.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target Renstra 2021-2026</b>	<b>Realisasi Kinerja sd tahun 2022</b>	<b>Capaian Kinerja sd tahun 2022</b>
I	% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan	3.50	5.29	151 %
	a. Kelapa Sawit	3.4924	5.29	151 %
	b. Kopi Arabika	0.00010	0.00006	60 %
	c. Kopi Robusta	0.00072	0.00087	121 %
	d. Nilam	0.00160	0.00196	122 %
	e. Kelapa Dalam	0.00214	0.00215	100 %
	f. Kelapa Hibrida	0.00190	-	-
	g. Pinang	0.00114	0.00035	31 %

Pada tabel 3.6. terlihat bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja % peningkatan/penurunan produksi komoditi perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah melampaui target renstra 2021-2026. Tetapi dapat dilihat untuk komoditi kopi arabika, pinang dan kelapa hibrida belum memenuhi target kinerja yang diharapkan sesuai Renstra. Angka capaian kinerja sebagian besar disumbang oleh peningkatan produksi komoditi kelapa sawit.

### **3.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022**

#### **3.2.1. Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022**

Pencapaian target kinerja sasaran strategis kedua Dinas Perkebunan, meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat diukur melalui pencapaian Opini BPK terhadap laporan keuangan, nilai SAKIP dan Level maturitas SPIP. Opini BPK terhadap laporan keuangan, nilai SAKIP dan Level maturitas SPIP diukur secara keseluruhan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat bukan instansi Dinas Perkebunan saja.

Nilai SAKIP diukur melalui hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/880/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi SAKIP

Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2021 adalah 62,24 (predikat B) dengan rincian pada komponen perencanaan kinerja memperoleh skor 23,25 dari bobot 30 (terrealisasi dari target sebesar 77,50 %). Hal tersebut menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja baik, artinya implementasi AKIP pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama sudah baik, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja sebab realisasi capaian sasaran ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 96,88% (predikat sangat tinggi).

Level Maturitas SPIP diukur melalui hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat nomor PE-09.02/LHP-582/PW17/3/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat menyatakan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3,132 dengan catatan masih terdapat sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah.

Opini BPK terhadap laporan keuangan diukur melalui hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun berkenaan. Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Pasaman Barat dua tahun terakhir memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 3.7.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja					
	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100 %	Sangat Tinggi
	2. Nilai SAKIP	Level	B	B	100 %	Sangat tinggi
	3. Level Maturitas SPIP	Nilai	2.35	3.13	133 %	Sangat Tinggi

### 3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.8.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**  
**Tahun 2021 dengan Tahun 2022.**

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022	2021	2022
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100 %	100 %
	2. Nilai SAKIP	B	B	100 %	100 %
	3. Level Maturitas SPIP	2,8	3,132	119 %	133 %

**Tabel 3.9.**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sampai tahun 2022 Dengan target Renstra Dinas Perkebunan 2021-2026**

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sd tahun 2022	Capaian Kinerja sd tahun 2022
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja			
	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100 %
	2. Nilai SAKIP	BB	B	62 %
	3. Level Maturitas SPIP	> 2,6	3,132	121 %

Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa ketiga indikator sasaran kedua untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan pada tahun 2022 terlaksana dengan baik dengan predikat sangat tinggi. Sedangkan untuk data banding dengan target renstra masih perlu peningkatan pada nilai SAKIP sebagaimana tercantum pada tabel 3.9. sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap OPD dalam persiapan dokumen penilaian SAKIP.

**3.3. Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

**Tabel 3.10.  
Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan APBD	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2022		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.251.629.976</b>	<b>4.787.367.835</b>	<b>95,13</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>131.429.000</b>	<b>119.769.259</b>	<b>93,55</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.305.000	40.230.000	99,81	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.124.000	79.539.259	87,29	100
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.707.569.964</b>	<b>4.267.190.005</b>	<b>96,19</b>	<b>100</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.349.711.464	3.914.030.566	89,98	100
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.238.500	330.539.439	98,60	100
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.620.000	22.620.000	100	100
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.520.000</b>	<b>11.320.000</b>	<b>90,42</b>	<b>100</b>
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.520.000	11.320.000	90,42	100
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>236.262.900</b>	<b>233.227.494</b>	<b>99,42</b>	<b>100</b>
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.724.400	39.697.063	99,93	100
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.798.500	15.797.262	99,99	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.740.000	177.733.169	98,34	100
<b>E</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>73.244.487</b>	<b>71.023.500</b>	<b>97,34</b>	<b>100</b>
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.157.187	43.233.200	95,74	100
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.087.300	27.790.300	98,94	100

<b>F</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90.603.625</b>	<b>84.837.577</b>	<b>93,83</b>	<b>100</b>
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.593.625	42.142.567	96,67	100
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.100.000	16.799.600	98,24	100
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.910.000	25.895.410	86,58	100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>306.074.000</b>	<b>157.241.664</b>	<b>67,57</b>	<b>84,25</b>
<b>G</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>244.624.000</b>	<b>99.088.900</b>	<b>40,51</b>	<b>70,00</b>
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	244.624.000	99.088.900	40,51	70,00
<b>H</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>61.450.000</b>	<b>58.152.764</b>	<b>94,63</b>	<b>98,50</b>
16	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	61.450.000	58.152.764	94,63	98,50
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>4.151.804.351</b>	<b>3.961.723.500</b>	<b>92,47</b>	<b>97,00</b>
<b>I.</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>30.212.000</b>	<b>27.032.850</b>	<b>89,48</b>	<b>97,00</b>
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	30.212.000	27.032.850	89,48	97,00
<b>J.</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>4.121.592.351</b>	<b>3.934.690.650</b>	<b>95,47</b>	<b>97,00</b>
18	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.121.592.351	3.934.690.650	95,47	97,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>12.271.000</b>	<b>12.236.650</b>	<b>99,72</b>	<b>100</b>
<b>K.</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>12.271.000</b>	<b>12.236.650</b>	<b>99,72</b>	<b>100</b>
19	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12.271.000	32.585.400	99,72	100
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>15.790.000</b>	<b>15.736.500</b>	<b>99,66</b>	<b>100</b>

<b>L</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	15.790.000	15.736.500	99,66	100
20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	15.790.000	15.736.500	99,66	100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>255.273.200</b>	<b>247.511.800</b>	<b>96,92</b>	<b>100</b>
<b>M</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>255.273.200</b>	<b>247.511.800</b>	<b>96,92</b>	<b>100</b>
21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	231.828.200	224.801.800	96,97	100
22	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	23.445.000	22.710.000	96,87	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.992.842.527</b>	<b>9.181.817.949</b>	<b>91,88</b>	<b>97,12</b>

Dari tabel realisasi anggaran secara umum kinerja Dinas Perkebunan untuk pagu anggaran yang diberikan pada tahun anggaran 2022 menunjukkan keberhasilan dengan realisasi capaian kinerja keuangan 91,88 % dan realisasi kinerja fisik 97.12 %. Sebagian besar pencapaian realisasi fisik kegiatan 100 %. Kegiatan yang rendah realisasi anggarannya adalah Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yaitu sebesar 40,51 % yang disebabkan oleh tidak terealisasinya Pengadaan Pupuk Kelompok Tani Jorong Aek Nabirong dan Pengadaan Pupuk NPK dan Urea Kelompok Tani Makmur Jorong Ophir.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian kinerja strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebanyak 2 indikator sasaran strategis dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Dari uraian realisasi dan capaian kinerja di atas dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (*performance plan*) bahwa 2 (dua) indikator sasaran strategis terlaksana dengan "baik".

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa hambatan dan dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan di tahun 2022 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan

tersebut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya.

2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Terjadinya kesalahan dalam penganggaran dimana nilai SSH (satuan standar harga) tidak lagi sesuai karena harga pasar yang mengikuti kenaikan harga BBM sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.
4. Masalah-masalah teknis, misalnya tidak terlaksananya dengan baik hampir seluruh kegiatan disebabkan tidak adanya dana tugas pembantuan APBN tahun 2022, kurangnya tenaga teknis di lapangan, realisasi penyaluran pupuk tidak sesuai dengan rekomendasi karena ketersediaan pupuk yang tidak memadai dengan permintaan/kebutuhan sebenarnya dilapangan dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM pegawai Dinas Perkebunan.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana Dinas Perkebunan
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan yang terdapat di DPA.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 telah merencanakan dan melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan dan 22 sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD II Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 2 sasaran strategis dalam 2 indikator kinerja utama dan 1 (satu) tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 berdasarkan klasifikasi penilaian mendapat predikat sangat tinggi yang berarti bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
3. Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa hambatan dan dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan di tahun 2022 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya.
  2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
  3. Terjadinya kesalahan dalam penganggaran dimana nilai SSH (satuan standar harga) tidak lagi sesuai karena harga pasar yang mengikuti kenaikan harga BBM sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.
  4. Masalah-masalah teknis, misalnya tidak terlaksananya dengan baik

hampir seluruh kegiatan disebabkan tidak adanya dana tugas pembantuan APBN tahun 2022, kurangnya tenaga teknis di lapangan, realisasi penyaluran pupuk tidak sesuai dengan rekomendasi karena ketersediaan pupuk yang tidak memadai dengan permintaan/kebutuhan sebenarnya dilapangan dan sebagainya.

#### **4.2. Strategi Pemecahan Masalah**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM OPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana OPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, antara barang/jasa yang tersedia secara fisik di toko dengan belanja yang ada di DPA.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

### KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. EDRIZAL

Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. HAMSUARDI

Jabatan : Bupati Pasaman Barat  
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. HAMSUARDI  


Simpang Empat, Januari 2022  
PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

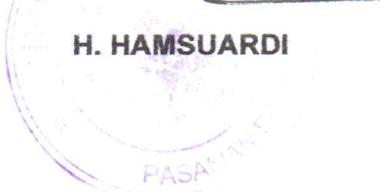
  
Ir. EDRIZAL  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19640218 199302 1 001  


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan produksi komoditi perkebunan	% Peningkatan/ penurunan produksi komoditi perkebunan : 1. Kelapa Sawit 2. Kopi Arabika 3. Kopi Robusta 4. Nilam 5. Kelapa Dalam 6. Kelapa Hibrida 7. Pinang	2,25		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan 2. Nilai SAKIP 3. Level Maturitas SPIP	WTP B 2.11		

Program		Anggaran	
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp	4.744.219.114
2.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp	293.224.000
3.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp	3.332.471.951
4.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp	12.432.500
5.	Program perizinan usaha pertanian	Rp	15.790.000
6.	Program penyuluhan pertanian	Rp	255.342.000
<b>JUMLAH</b>		Rp	<b>8.653.479.565</b>

Bupati Pasaman Barat,

  
**H. HAMSUARDI**  


Simpang Empat, Januari 2022

Kepala Dinas Perkebunan



**Ir. EDRIZAL**  
 Pembina Utama Muda / IVc  
 NIP. 19640218 199302 1 001